



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUCKY DANARDONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **199505**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/252 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/151 m² di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1181 m² di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 269.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. LAINNYA, JAM GRIS - Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. LAINNYA, G-SHOCK GA-1000 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. LAINNYA, TREK 600CLV KARBON Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. LAINNYA, POLYGON STRATTOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. LAINNYA, SISKIUD5 SISKIUD5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
8. LAINNYA, SISKIUD7 SISKIUD7 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
9. LAINNYA, SELIS ROADMASTER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



8.000.000

10. LAINNYA, PUDINS 16.11GE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

11. MOBIL, BMW 520I/SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **150.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **10.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **6.000.000****Sub Total** Rp. **1.235.000.000****III. HUTANG** Rp. **238.894.400****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **996.105.600**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.